

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey, Sujadmoko. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Bambang, Hendarso Danuri. *Buku Panduan Polri Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009.
- Bambang, Hendarso Danuri. *Buku Panduan Polri Tentang Perpolisian Masyarakat*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010.
- Imam, Sudjarwo. *Modul Pelatihan HAM Bagi Anggota Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Kelapadua: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009.
- Martiman, Prodjohamidjojo. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mukti, Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Murtir, Jeddawi. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Total Media, 2012.
- M. Khoidir dan Sadjijono. *Menatap Wajah Polisi Kita*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2005.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Soejono, Soekanto dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Pudi, Rahardi. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Jakarta: Laksbang Grafika, 2014.
- R. Abdussalam. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Romli, Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2001.
- Yoyok, Ucok Suyono. *Hukum Kepolisian (Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*. Yogyakarta: Lakbang Grafika, 2013.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

_____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. LN Tahun 1961, No. 245, TLN No. 2289.

_____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TLN No. 3851.

_____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. LN Tahun 1997, No. 81, TLN No. 3710.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.

_____. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

_____. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung. LD Kota Bogor Tahun 2006, No. 2 seri e.

_____. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. BN Tahun 2009, No. 150.

_____. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. BN Tahun 2009, No. 6.

_____. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. BN Tahun 2012.

_____.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. BN Tahun 2012.

Internet:

M. Imdadun Rahmat. 2014. “Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Komnas HAM RI 2014.” Diakses dari <http://www.komnasham.go.id/pengawasan/laporan-akhir-tahun-kebebasan-beragamaberkeyakinan-komnas-ham-ri-2014>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2015, pukul 09.00 WIB.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). 2012. “Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah.” <http://kontras.org/buku/buku%20pemantauan.pdf>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2014, pukul 12.24 WIB.

Wawancara:

AKBP Samsul interview. 2015. “Tindakan Kepolisian Pada Kasus GKI Yasmin.” Bogor.